

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Strategi Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks, dan teknologi kini telah merubah cara manusia berkomunikasi secara drastis.(Studies 2021)

Dalam konteks komunikasi, seorang komunikator diwajibkan menggunakan ungkapan yang sopan, santun, dan sarat dengan kebijaksanaan. Pemilihan bahasa yang beradab tidak hanya mencerminkan karakter individu tersebut, tetapi juga mempengaruhi keberhasilan dalam penyampaian pesan. Dalam ajaran Islam, pentingnya berbicara dengan bahasa yang baik

dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 263:

أَدَّىٰ وَاهْلَ غَيِّ حَلِيٍّ قَوْلٍ مَّعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ مَّ يَتَّبِ ٥

“Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih utama daripada sedekah yang disertai dengan hal yang menyakitkan hati penerimanya. Allah Maha Kaya dan Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 263)

Kalimat ini menggarisbawahi bahwa ungkapan yang sopan memiliki nilai yang sangat berarti, bahkan lebih terhormat dibandingkan dengan sedekah yang disertai oleh kata-kata atau perilaku yang menyakitkan. Ini menandakan bahwa dalam proses komunikasi, etika dan empati menjadi prinsip utama agar pesan tidak hanya disampaikan, tetapi juga diterima secara positif oleh pihak yang diajak berkomunikasi (Ibnu Katsir. 2000)

Komunikasi memegang peranan krusial dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membangun dan memelihara interaksi sosial sehari-hari. Bentuk komunikasi yang paling

mendasar dan esensial berlangsung dalam unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Dalam proses komunikasi keluarga, umpan balik (*feedback*) menjadi komponen penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami secara tepat serta mampu mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan (DeVito, 2016; Effendy, 2008).

Secara *etimologis*, istilah "komunikasi" berakar dari bahasa Latin, yaitu kata *cum* yang berarti "dengan" atau "bersama", serta unus yang berarti "satu". Perpaduan kedua kata tersebut menghasilkan istilah *communio*, yang kemudian berevolusi menjadi *communicatio*, dan dalam bahasa Inggris disebut *communication*. Makna awal dari kata ini mencerminkan konsep kebersamaan, persatuan, serta interaksi antarindividu. Kata kerja *communicare* sendiri memiliki arti "membagikan sesuatu kepada orang lain", "berbicara", "bertukar gagasan", atau "menjalin hubungan"

Adapun tipe-tipe komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Komunikasi Intrapersonal

Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri individu, seperti berpikir, merenung, dan menilai diri sendiri. Jenis komunikasi ini berperan penting dalam pembentukan sikap, persepsi, serta pengambilan keputusan. (Effendy, 2008)

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung sehingga lebih efektif dalam membangun hubungan sosial, termasuk dalam lingkungan keluarga (DeVito, 2016).

c. Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok terjadi dalam interaksi antara individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok dengan

tujuan tertentu, seperti diskusi, musyawarah, atau kerja sama tim. Jenis komunikasi ini menekankan pada dinamika kelompok dan peran masing-masing anggota .(Hargie, 2011)

d. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi berlangsung dalam suatu struktur formal maupun informal di dalam organisasi. Komunikasi ini mencakup aliran informasi vertikal, horizontal, dan diagonal yang bertujuan untuk mencapai efektivitas kerja dan tujuan organisasi (Pace & Faules, 2013).

e. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media massa kepada khalayak luas dan heterogen, seperti melalui televisi, radio, surat kabar, dan media digital. Komunikasi ini bersifat satu arah dengan umpan balik yang tertunda (McQuail, 2010).

2. Pengertian Strategi Komunikasi

Dalam upaya mengatasi persoalan komunikasi, para perencana kerap berhadapan

dengan berbagai kendala, terutama dalam merancang strategi pemanfaatan sumber daya komunikasi yang ada guna mencapai sasaran tertentu.

Strategi komunikasi merupakan suatu desain yang dirancang untuk mengubah perilaku manusia melalui proses penyebaran gagasan baru (Cangara, 2014; Rogers, 2003). Strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi dan pengelolaan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu secara terukur dan sistematis (Effendy, 2003). Strategi komunikasi yang efektif harus mampu menjelaskan langkah-langkah operasional yang dapat diterapkan secara praktis di lapangan (Effendy, 2008). Oleh karena itu, pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta situasi yang sedang berlangsung. (Mulyana, 2010)

Strategi komunikasi berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan perilaku baik pada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, strategi komunikasi perlu dirancang melalui perencanaan yang teliti supaya

tujuan komunikasi dapat dicapai secara efektif. Perencanaan tersebut meliputi berbagai elemen, seperti analisis situasi, penetapan tujuan, pemilihan media yang tepat, serta evaluasi terhadap dampak komunikasi. Dalam merancang strategi komunikasi, terdapat sejumlah komponen utama yang wajib diperhatikan, antara lain :

- a. .Komunikator (Pengirim) – Individu atau entitas yang merancang serta menyampaikan pesan, seperti pemerintah, lembaga, atau pihak yang memiliki otoritas dan kredibilitas.
- b. Pesan (*Message*) – Informasi atau isi yang ingin disampaikan kepada audiens, yang harus dirancang dengan kejelasan, relevansi, dan kemudahan pemahaman.
- c. Media atau Saluran Komunikasi (*Channel*) – Media atau jalur yang dipakai untuk menyampaikan pesan, misalnya media massa, platform media sosial, komunikasi langsung, maupun komunikasi interpersonal.
- d. Komunikan (Penerima) – Sasaran komunikasi yang menerima pesan, yang harus dianalisis

berdasarkan karakteristik sosial, budaya, serta psikologisnya.

- e. Efek atau Umpan Balik (*Effect/Feedback*) – Reaksi atau dampak yang muncul dari komunikasi setelah pesan diterima, yang berperan sebagai indikator keberhasilan strategi komunikasi. (Alif, Karnay, dan Amir, 2023)

Strategi komunikasi merupakan salah satu proses krusial dalam mewujudkan tujuan komunikasi tertentu secara efektif dan efisien (Ismah 2023)

Berbagai ahli telah mengemukakan definisi mengenai strategi komunikasi yang secara umum menitikberatkan pada pentingnya perencanaan, pemilihan pesan, media, serta target audiens. Berikut ini beberapa pengertian strategi komunikasi menurut para ahli:

- a. Wilbur Schramm, seorang pakar komunikasi terkemuka, mendefinisikan strategi komunikasi sebagai “pemanfaatan pesan

komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif.”

- b. Wimmer dan Dominick menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah “perencanaan yang melibatkan pemilihan media, pesan, dan target audiens guna mencapai tujuan komunikasi.”
- c. John J. Murphy dalam bukunya *Public Relations Strategy* mendefinisikan strategi komunikasi sebagai “rencana sistematis untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu, termasuk pemilihan pesan yang tepat, audiens yang sesuai, dan media yang efektif.”
- d. Dozier, Grunig, dan Larissa A. Grunig mengemukakan bahwa strategi komunikasi adalah “proses perencanaan sistematis yang mencakup pemilihan tujuan, pesan, taktik, dan sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan komunikasi organisasi.”
- e. Donald E. Schultz dan Philip J. Kitchen dalam buku *Measuring IMC: The Role of Research in Integrated Marketing*

Cmmunications menyatakan bahwa strategi komunikasi merupakan “rencana yang mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi, seperti iklan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat (PR), dan promosi, untuk meraih tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pada dasarnya merupakan rangkaian langkah yang dirancang secara sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan komunikasi tertentu. Strategi ini mencakup proses perencanaan yang matang, pemilihan media dan pesan yang tepat, serta identifikasi audiens yang sesuai, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh pihak yang dituju. (Nurfaidah, Nurlaela, dan Garis 2023)

3. Tujuan Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan proses perencanaan dan pengelolaan pesan yang dirancang secara sistematis untuk disampaikan

kepada audiens sasaran agar pesan tersebut dapat dipahami, diterima, serta menghasilkan respons yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh komunikator atau organisasi. (Effendy, 2003)

Secara Umum, Tujuan Strategi komunikasi Meliputi :

- a. Mengoptimalkan Pemahaman
Mengkomunikasikan informasi secara jelas dan akurat agar audiens dapat memahami pesan yang disampaikan.
- b. Memodifikasi sikap atau tindakan Mengubah persepsi, opini, atau kebiasaan khalayak (contohnya dalam konteks kampanye kesehatan, politik, atau pemasaran).
- c. Mengembangkan citra atau reputasi
Membentuk persepsi yang menguntungkan terhadap organisasi, produk, maupun individu
- d. Mengupayakan Terwujudnya Sasaran Komunikasi Berperan dalam mendukung realisasi visi, misi, serta program kerja organisasi, baik dalam konteks komunikasi internal maupun eksternal.

- e. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan, pelanggan, komunitas, maupun media.

4. Unsur – Unsur Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi menjadi indikator keberhasilan strategi komunikasi, apakah tujuan komunikasi telah tercapai atau belum (Effendy, 2003).

a. Komunikator

Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada audiens. Keberhasilan strategi komunikasi sangat dipengaruhi oleh kredibilitas, daya tarik, dan keahlian komunikator dalam menyampaikan pesan. Komunikator yang dipercaya cenderung lebih mudah memengaruhi audiens (Effendy, 2003).

b. Pesan

Pesan merupakan isi informasi, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan kepada audiens. Pesan harus dirancang secara jelas, menarik, dan sesuai dengan tujuan komunikasi agar dapat dipahami dan diterima

dengan baik oleh sasaran komunikasi (Cangara, 2014).

c. Media atau Saluran Komunikasi

Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik melalui media cetak, elektronik, digital, maupun tatap muka. Pemilihan media yang tepat sangat penting agar pesan dapat menjangkau audiens secara efektif dan efisien (Kotler & Keller, 2016).

d. Komunikan

Komunikan adalah pihak penerima pesan. Dalam strategi komunikasi, audiens harus dianalisis berdasarkan karakteristik demografis, psikologis, dan sosial budaya agar pesan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman mereka (Cangara, 2014).

e. Efek atau Dampak

Efek merupakan perubahan sikap, pengetahuan, atau perilaku audiens setelah menerima pesan. Efek menjadi indikator keberhasilan strategi komunikasi, apakah

tujuan komunikasi telah tercapai atau belum (Effendy, 2003).

5. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang dapat dipahami dengan baik sehingga menimbulkan perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku pada penerima pesan. Sehingga saat ini keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan termasuk karir, banyak ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi (Nur Sabi'is 2023)

Dalam konteks komunikasi kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perilaku hidup sehat, termasuk dalam upaya pencegahan stunting.

Menurut **Harold D. Lasswell**, komunikasi dapat dipahami melalui rumusan: *Who says what in which channel to whom with what effect*. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh

komunikator, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, audiens yang menerima pesan, serta efek yang dihasilkan.

Selain itu, **Everett M. Rogers** menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi dalam perubahan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan secara jelas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta menggunakan media yang mudah dipahami oleh sasaran komunikasi.

Dalam konteks pencegahan stunting, komunikasi yang efektif dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, kegiatan posyandu, pendampingan keluarga, serta penggunaan media komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

B. Kajian Teori Kader Pembangunan Manusia (KPM)

1. Pengertian Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah seorang warga desa yang dipilih melalui musyawarah desa dan memiliki tugas mendukung program percepatan penurunan stunting serta

pengembangan sumber daya manusia dengan cara memfasilitasi, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi layanan dasar di tingkat desa. (“BUKU_1_Pedoman-Umum-Kader-Pembangunan-Manusia.pdf,” n.d.)

Kader Pembangunan Manusia (KPM) bukanlah tenaga kesehatan profesional, melainkan sukarelawan yang dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program-program terkait peningkatan gizi serta kesehatan ibu dan anak. Peran Kader Pembangunan MANusia (KPM) tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya kerjasama multisektor di tingkat desa.

Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di latar belakang oleh beberapa urgensi, antara lain:

- a. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi angka stunting. Diperlukan upaya terkoordinasi dari

berbagai sektor, termasuk pelibatan hingga tingkat desa.

- b. Kesenjangan dalam informasi dan akses layanan: Masih terdapat sejumlah besar masyarakat di wilayah pedesaan, khususnya keluarga dengan anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang belum memperoleh informasi yang cukup serta akses yang optimal terhadap layanan dasar terkait kesehatan dan izin..
- c. Keterbatasan jumlah tenaga profesional: Tenaga kesehatan di Puskesmas atau di tingkat desa sering kali memiliki cakupan wilayah kerja yang terbatas. Kader Pembangunan Manusia (KPM) berfungsi sebagai perpanjangan atau perwakilan dari mereka.
- d. Signifikansi Pemberdayaan Masyarakat: Stunting merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Kader Pembangunan Manusia (KPM) berperan sebagai agen penggerak dalam memastikan partisipasi tersebut terlaksana.

2. Dasar Hukum dan Kebijakan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019
- f. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Strategi Penanganan Gizi
- g. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

3. Tugas Pokok KPM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Dasar Hukum Tugas KPM Serta Berbagai Program Seperti Rencana Aksi Nasional Untuk Percepatan Penurunan Stunting,

Yang Mencakup Antara Lain:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting kepada masyarakat desa, termasuk memperkenalkan alat tika pertumbuhan untuk mengukur Tinggi/Panjang Badan sebagai sarana deteksi dini stunting.
- b. Melakukan pendataan terhadap sasaran rumah tangga 1.00 HPK, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak berusia 0 hingga 2 tahun, kemudian menginput data tersebut ke dalam aplikasi EHDW.
- c. Melakukan pemantauan terhadap layanan pencegahan stunting pada 1.000 HPK guna menjamin bahwa setiap individu dalam sasaran pencegahan stunting memperoleh layanan yang bermutu.
- d. Memperluas akses bagi rumah tangga sasaran terhadap layanan dasar seperti layanan kesehatan, program IZI, penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, pendidikan anak usia dini (PAUD), serta bantuan sosial.
- e. Mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi mengenai pentingnya pencegahan

stunting serta pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mensosialisasikan program konvergensi pencegahan stunting.

- f. Mengawasi pelaksanaan layanan dasar dengan melakukan pemantauan terhadap tingkat keterjangkauan serta kualitas layanan dasar yang diterima oleh rumah tangga sasaran di desa.
- g. Mengarsipkan dan menyampaikan data serta aktivitas dengan cara menyusun laporan mengenai kegiatan dan perkembangan layanan kepada pemerintah desa serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- h. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa serta para pemangku kepentingan dengan menjalin kerja sama bersama kepala desa, kader posyandu, bidan, pendamping desa, dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan sumber daya manusia.
- i. Menginisiasi perubahan perilaku dalam masyarakat dengan mendorong penerapan gaya hidup sehat, konsumsi gizi yang seimbang, serta praktik pola asuh yang tepat.

4. Peran KPM dalam Penurunan Stunting

Kader Pembangunan Manusia (KPM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa. Kader Pembangunan Manusia (KPM) tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan (*change agent*) yang berkontribusi langsung dalam percepatan penurunan angka stunting melalui pendataan, sosialisasi, dan pendampingan masyarakat (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018).

Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), karena tanpa partisipasi mereka, program pembangunan manusia tidak dapat berjalan optimal dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan (Suharto, 2010; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2018).

- a. Memberikan dukungan moral dan sosial terhadap program yang dijalankan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- b. Meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap program, sehingga mereka termotivasi untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
- c. Memastikan efektivitas program dengan menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- d. Membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pembangunan manusia, terutama dalam penurunan stunting, adalah tanggung jawab bersama.

C. Pencegahan Dan Penurunan Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat defisiensi gizi kronis atau berulang, yang terjadi sejak masa kehamilan hingga usia dini. Anak-anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan di bawah standar sesuai usia dan tidak mencapai potensi

kognitif maksimalnya. Kondisi ini mencerminkan gangguan pertumbuhan jangka panjang yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak memadai, serta dapat berdampak pada kesehatan, perkembangan, dan produktivitas anak di masa depan (WHO, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Stunting adalah kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu akibat defisiensi gizi kronis dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting memiliki perawakan lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan sesuai usianya. Kekurangan gizi ini umumnya terjadi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 24 bulan, periode yang dikenal sebagai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak di masa depan (WHO, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Status gizi ibu selama kehamilan, asupan nutrisi anak, serta kondisi kesehatan dan lingkungan merupakan faktor krusial dalam

pengecahan stunting. Jika pada periode penting ini anak tidak memperoleh gizi yang memadai, maka proses pertumbuhan fisik maupun perkembangan otak dapat terganggu, yang berpotensi memengaruhi kemampuan kognitif dan kualitas hidup anak di masa mendatang (WHO, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Stunting tidak hanya memengaruhi kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan dampak terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan. Dengan demikian, stunting tidak semata-mata dianggap sebagai masalah kesehatan, melainkan juga sebagai kendala dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yusran 2024).

2. Penyebab Stunting

Beragam faktor berkontribusi terhadap terjadinya stunting, termasuk gizi buruk yang dialami ibu maupun anak, baik pada masa kehamilan maupun saat anak berada dalam usia balita. Kurangnya pemahaman ibu mengenai

pentingnya kesehatan dan asupan nutrisi sebelum, selama, maupun setelah kehamilan juga menjadi faktor utama penyebab stunting. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama layanan antenatal care (ANC) untuk memantau kesehatan janin dan ibu hamil, serta layanan posnatal dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, turut memengaruhi risiko stunting pada anak (WHO, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Ketersediaan makanan bergizi masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama karena tingginya harga bahan pangan bergizi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses gizi yang memadai. Selain itu, keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, khususnya di wilayah terpencil, turut memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko stunting pada anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; WHO, 2018).

Banyak ibu belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis makanan yang

dibutuhkan anak selama masa pertumbuhan. Mereka cenderung lebih fokus pada kuantitas atau kualitas makanan secara umum tanpa memperhatikan nilai gizinya. Selain itu, sejumlah ibu masih sering memberikan makanan instan atau makanan yang kurang sehat, yang berpotensi memengaruhi status gizi dan perkembangan anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021; WHO, 2018).

Dampak yang timbul akibat stunting dapat diklasifikasikan menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek mencakup gangguan pada perkembangan otak dan kecerdasan, pertumbuhan fisik yang terhambat, serta disfungsi metabolisme tubuh. Sementara itu, dampak jangka panjang meliputi penurunan kemampuan kognitif serta prestasi belajar, melemahnya sistem kekebalan tubuh yang meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit, dan risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, serta disabilitas pada usia lanjut. (Rini et al. 2024)

3. Dampak Stunting

Berbagai studi telah mengidentifikasi sejumlah faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada anak. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif yang tidak memadai, status gizi ibu hamil yang kurang optimal, tingkat pendidikan ibu yang rendah, berat badan lahir rendah (BBLR), serta kekurangan mikronutrien esensial seperti zat besi dan seng, yang semuanya berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak (WHO, 2018; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Perkembangan kognitif yang terlambat dapat dikenali melalui beberapa gejala, antara lain kemampuan mengingat yang lemah, kesulitan dalam mengenali huruf, perilaku hiperaktif yang mengganggu konsentrasi, serta kecenderungan impulsif. (Nusantara et al. 2025)

Stunting tidak hanya berdampak pada keterlambatan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi aspek kognitif, kemampuan belajar,

dan kapasitas fisik, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas individu di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki prestasi akademik dan kemampuan fisik yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan status gizi normal. Oleh karena itu, tingginya angka stunting dapat menjadi ancaman signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa di masa mendatang (Black et al., 2013; Grantham-McGregor et al., 2007).

Selain berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, stunting juga meningkatkan risiko anak mengalami penyakit degeneratif pada masa dewasa. Anak yang mengalami kekurangan gizi kronis sejak usia dini cenderung lebih rentan terhadap obesitas, diabetes, dan gangguan metabolisme lainnya di kemudian hari. Hal ini terkait dengan adaptasi metabolik tubuh terhadap kekurangan gizi pada masa awal kehidupan, yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan gangguan regulasi glukosa serta metabolisme energi.

Akibatnya, tubuh lebih mudah mengalami penumpukan lemak (lipogenesis) ketika asupan kalori berlebih. Dengan demikian, stunting berkontribusi pada masalah gizi ganda, yaitu kondisi kekurangan dan kelebihan gizi yang terjadi bersamaan dalam satu populasi (Victora et al., 2008; Prentice, 2006).

Selain itu, stunting juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang mengalami stunting umumnya memiliki kemampuan kognitif dan fisik yang lebih rendah, sehingga ketika mencapai usia produktif, kualitas dan kapasitas mereka dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa menjadi terbatas. Kondisi ini akan memengaruhi daya saing nasional di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh sebab itu, penanganan stunting memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat luas, hingga pemerintah dan lembaga legislatif. (Dasman 2019)

4. Strategi Penanggulangan Stunting

Stunting memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak apabila tidak segera diantisipasi atau ditangani. Dalam jangka pendek, anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas, terutama akibat infeksi seperti pneumonia dan diare, yang terkait dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Selain itu, pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak dapat mengalami keterlambatan, sehingga memengaruhi kemampuan belajar dan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan anak secara langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas hidupnya secara menyeluruh (Black et al., 2013; WHO, 2018).

Strategi penanggulangan stunting yang diterapkan masyarakat meliputi:

- a. Suplemen Makanan Pemberian suplemen seperti vitamin A, zat besi, serta mikronutrien lainnya kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi serta mendukung pertumbuhan yang optimal.

- b. Edukasi Nutrisi Pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya pola gizi seimbang, praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA), serta pemahaman mengenai makanan lokal yang bergizi.
- c. Bantuan Sosial dan Pangan Pelaksanaan program bantuan yang mencakup makanan tambahan, bantuan tunai, atau sembako bagi keluarga dengan risiko tinggi demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka.
- d. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Penekanan pada layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan yang aman, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin.
- e. WASH (Air, Sanitasi, dan Kebersihan) serta Program Berbasis PAUD

- 1) WASH: Upaya meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
- 2) PAUD: Integrasi layanan gizi, kesehatan, dan stimulasi dini dalam lembaga PAUD guna mendukung perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. (Tendean, Alhalawi, dan Chaidar 2022)

D. Kajian Teori Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terletak di suatu wilayah tertentu, yang tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakatnya. Pada umumnya, penduduk desa sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka. Di sisi lain, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan sosial yang berlaku dan dihormati oleh seluruh anggota

masyarakat. Kesepakatan ini seiring waktu menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari serta melekat dalam diri setiap warga, sehingga membentuk ciri khas yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. (Fikruzzaman 2022).

Desa merupakan suatu entitas masyarakat hukum yang didirikan atas dasar adat dan hukum adat, serta menempati wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Komunitas desa memiliki keterikatan lahiriah dan batiniah yang mendalam, baik melalui hubungan kekerabatan (keturunan) maupun karena adanya kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, serta aspek-aspek lain. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Desa memiliki struktur kepemimpinan atau susunan pengurus yang ditetapkan melalui musyawarah, serta memiliki kekayaan sendiri dalam jumlah tertentu. Berdasarkan hal tersebut, desa berhak dan berwenang untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri. Pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, desa mencakup desa dan desa adat atau yang dikenal dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut sebagai desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peran Desa dalam Pembangunan

Pembangunan desa merupakan komponen integral dalam upaya pembangunan nasional secara keseluruhan. Peran dan signifikansinya sangat strategis dalam mencapai tujuan nasional karena desa beserta masyarakatnya menjadi dasar utama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam dimensi politik,

sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Oleh sebab itu, kemajuan desa menjadi indikator krusial bagi kemajuan bangsa secara menyeluruh. (Janice 2015)

Pentingnya pembangunan desa akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin terbuka serta kemajuan demokrasi yang terus berkembang.

Namun demikian, desa masih sering diasosiasikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal, desa memiliki peran krusial mengingat mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan dan berprofesi sebagai petani maupun nelayan. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan pedesaan semestinya dijadikan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional.

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum yang menempati wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kedudukan

desa sebagai subjek pemerintahan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam konteks pembangunan sosial, desa diberikan ruang dan otoritas yang luas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya.

Pemerintah kabupaten/kota berperan memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan, sekaligus menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, sehingga desa memiliki kemandirian dan tanggung jawab penuh dalam mengelola pembangunan di wilayahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal dengan kewenangan yang luas dalam

mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kewenangan tersebut mencakup tiga pilar utama, yaitu pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 18 dan Pasal 19).

a. Pelayanan Publik

Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tugas ini meliputi pengelolaan administrasi kependudukan, pengurusan surat menyurat, serta layanan dasar lain yang langsung dibutuhkan oleh warga. Peran tersebut sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga secara tepat waktu dan efisien.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak hanya meliputi aspek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, atau saluran irigasi, namun juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tugas pemerintah desa adalah merancang, melaksanakan, serta mengawasi proyek-proyek pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Prioritas utama adalah pengembangan sarana dan prasarana desa guna meningkatkan kualitas kehidupan dan memudahkan kegiatan ekonomi.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (2)). Pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek, sehingga mereka memiliki peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Pemerintah desa memiliki beberapa peran kunci dalam pembangunan, di antaranya sebagai perencana, pelaksana, fasilitator, dan penggerak partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa memiliki beberapa peran kunci dalam pembangunan, di antaranya:

- a. Penyelenggara Pembangunan Mereka bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, serta mengawasi berbagai proyek pembangunan, yang mencakup baik infrastruktur fisik maupun program sosial.
- b. Fasilitator Perubahan Sosial Pemerintah desa berperan sebagai penghubung dalam pelaksanaan perubahan sosial yang dirancang

oleh pemerintah pusat, dengan memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- c. Koordinator dan Kolaborator dalam mengoordinasikan berbagai pihak, seperti warga, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, agar dapat bekerja sama dalam menjalankan Kegiatan pembangunan.

3. Peran Desa Dalam Penurunan Stunting

Desa memiliki peran strategis dalam upaya penurunan stunting sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Peran tersebut diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa, seperti RKPDes dan APBDes. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa berwenang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan dan gizi masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 18 dan Pasal 19). Selain itu, komitmen desa dalam penurunan

stunting diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menegaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam pendataan sasaran, edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran Posyandu, serta pemberdayaan keluarga berisiko stunting. Melalui kolaborasi dengan kader kesehatan, bidan desa, dan partisipasi aktif masyarakat, desa menjadi aktor utama dalam memastikan intervensi spesifik dan sensitif stunting berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

4. Desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Konteks Penurunan Stunting.

a. Desa dalam konteks penurunan stunting

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat dengan berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.

Dalam konteks penurunan stunting desa berperan sebagai:

- 1) Tempat utama pelaksanaan program konvergensi stunting.
- 2) Pelaksana program dari pemerintah pusat.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa

Sedangkan menurut Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting desa bertugas untuk:

- 1) Merancang rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang mendukung intervensi gizi.
 - 2) Menetapkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi.
 - 3) Mengoptimalkan peran Posyandu, PAUD, serta pelaksanaan program 1000 HPK.
- b. Kader Pembangunan Manusia dalam Konteks penurunan Stunting.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) memiliki peran strategis dalam konteks

penurunan stunting di tingkat desa sebagai ujung tombak pendampingan masyarakat. KPM bertugas membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan pendampingan terhadap keluarga sasaran, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar memperoleh layanan kesehatan dan gizi yang memadai.

Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) ditegaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) berfungsi mendukung konvergensi pencegahan stunting di desa melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pemantauan layanan dasar, serta fasilitasi koordinasi antar pelaku pembangunan desa.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kader Pembangunan

Manusia (KPM) diposisikan sebagai bagian dari upaya penguatan peran masyarakat dalam memastikan intervensi spesifik dan sensitif stunting berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

Dengan peran tersebut, Kader Pembangunan Manusia (KPM) tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia desa.